



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/6212/KSP.00/70-76/10/2026 02 Oktober 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Diseminasi dan Monitoring Implementasi Komitmen
Bersama dan Rencana Aksi Perbaikan Tata
Kelola Otonomi Khusus Papua

Yth. 1. Pejabat Kementerian / Lembaga

2. Gubernur

3. Bupati / Wali Kota

4. Ketua DPR Provinsi dan Ketua DPR Kabupaten / Kota

5. Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP)

di

Tempat

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Berkenaan hal tersebut serta dalam rangka menindaklanjuti surat KPK nomor B/5060/KSP.00/70-76/08/2026 tanggal 12 Agustus 2026 hal Penyampaian Dokumen Komitmen Bersama, Kertas Kerja dan *Timeline* Tahapan Implementasi Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua Tahun 2026-2027, Kami mengundang Saudara untuk dapat hadir secara daring pada:

Hari, tanggal : Selasa, 6 Oktober 2026

Pukul : 08.00 s.d. 10.00 WIB (10.00 - 12.00 WIT)

Agenda : Diseminasi dan Monitoring Implementasi Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua

Link zoom : <https://kpk-go-id.zoom.us/j/82034446221>
Meeting ID: 820 3444 6221
Passcode: QPZ11QXa

Untuk koordinasi lebih lanjut, staf Saudara dapat menghubungi Sdr. Ardan Fitra pada telepon (021) 25578300 ext. 7467, nomor ponsel 085320606953 atau alamat *email* ardan.fitra@kpk.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Ely Kusumastuti

Tembusan:

1. Pimpinan KPK
2. Plt. Inspektur KPK

Lampiran
Surat Nomor : B/6212/KSP.00/70-
76/10/2026
Tanggal : 02 Oktober 2026

DAFTAR TUJUAN SURAT

A. KEMENTERIAN/ LEMBAGA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD, Ditjen Otonomi Daerah
2. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah
3. Direktur Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah
4. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda
5. Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Ditjen Dukcapil
6. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Dukcapil

KEMENTERIAN KEUANGAN

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan, Ditjen Perimbangan Keuangan

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Kedeputan Bidang Pembangunan Kewilayahan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah, Kedeputan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD)

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

BADAN PENGARAH PAPUA (BPP)

1. Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua
2. Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Selatan
3. Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya
4. Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan

B. PEMERINTAH DAERAH

1. Provinsi Papua
2. Kota Jayapura

3. Kabupaten Jayapura
4. Kabupaten Keerom
5. Kabupaten Sarmi
6. Kabupaten Mamberamo Raya
7. Kabupaten Biak Numfor
8. Kabupaten Kepulauan Yapen
9. Kabupaten Supiori
10. Kabupaten Waropen
11. **Provinsi Papua Selatan**
12. Kabupaten Merauke
13. Kabupaten Boven Digoel
14. Kabupaten Mappi
15. Kabupaten Asmat
16. **Provinsi Papua Barat Daya**
17. Kota Sorong
18. Kabupaten Sorong
19. Kabupaten Sorong Selatan
20. Kabupaten Raja Ampat
21. Kabupaten Tambrau
22. Kabupaten Maybrat
23. **Provinsi Papua Pegunungan**
24. Kabupaten Jayawijaya
25. Kabupaten Pegunungan Bintang
26. Kabupaten Mamberamo Tengah
27. Kabupaten Lanny Jaya
28. Kabupaten Yahukimo
29. Kabupaten Tolikara
30. Kabupaten Yalimo
31. Kabupaten Nduga

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Ely Kusumastuti

